

Digital Transformation for PKK Women: Strengthening Finance, Capital Access, and Economic Independence

Transformasi Digital bagi Perempuan PKK: Penguatan Keuangan, Akses Permodalan, dan Kemandirian Ekonomi

Rahmi Nur Islami¹, Kartini², Nisa Ariantini³, Nurjannatul Hasanah⁴, Kholiql Lutfi Alfizar Yonti⁵, Achmad Kholili⁶

Fakultas Ekonomi, Universitas Borneo Tarakan^{1,2,4,5,6}
Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan³
rahminurislami@borneo.ac.id

ABSTRAK

Perempuan yang tergabung dalam kelompok PKK memainkan peran strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital, peningkatan literasi keuangan, serta perluasan akses permodalan. Meskipun memiliki potensi yang kuat, sebagian besar anggota PKK masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, terbatasnya akses pembiayaan formal, dan minimnya pemanfaatan platform digital untuk kegiatan usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan model pemberdayaan yang mengintegrasikan manajemen keuangan, akses permodalan berbasis digital, serta pengembangan kemandirian berwirausaha bagi perempuan PKK di Kelurahan Karang Anyar, Kota Tarakan. Dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research, intervensi program disusun berdasarkan hasil identifikasi masalah melalui survei, wawancara, dan diskusi kelompok terarah (FGD), yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui pelatihan literasi keuangan, lokakarya pemasaran digital, serta fasilitasi hubungan dengan lembaga keuangan. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan signifikan pada kapasitas digital peserta, di mana mayoritas anggota telah mampu mengoperasikan aplikasi pencatatan keuangan, memanfaatkan media sosial untuk pemasaran, dan melakukan transaksi nontunai. Program ini juga mendorong lahirnya lima produk usaha baru serta peningkatan pendapatan usaha rumah tangga melalui perluasan pasar berbasis digital. Integrasi literasi keuangan, keterampilan digital, dan akses terhadap permodalan terbukti efektif dalam memperkuat kemandirian ekonomi perempuan serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Transformasi Digital, Literasi Keuangan, Pemberdayaan Perempuan, PKK

1. Pendahuluan

Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup rumah tangga sekaligus memperkuat kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi. Selain menjalankan fungsi sosial, PKK juga berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi komunitas yang berfokus pada perempuan. Meskipun demikian, kelompok ini masih dihadapkan pada sejumlah persoalan mendasar, terutama rendahnya tingkat literasi keuangan, terbatasnya akses terhadap modal usaha, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi (Hamzah et al., 2025).

Peran besar perempuan dalam perekonomian nasional telah banyak diakui. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, menegaskan bahwa perempuan menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan hampir separuh dari 60 juta UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan (Kementerian Keuangan, 2021). Namun demikian, akses perempuan terhadap layanan keuangan formal masih sangat rendah. Data menunjukkan bahwa hanya 18% dari keseluruhan kredit perbankan dialokasikan untuk UMKM, padahal sebagian besar usaha tersebut dimiliki oleh perempuan (Nofriadi et al., 2024). Kondisi ini mencerminkan

adanya kesenjangan yang signifikan antara besarnya kontribusi ekonomi perempuan dan keterjangkauan mereka terhadap sumber daya finansial.

Selain itu, rendahnya tingkat adopsi teknologi digital di kalangan pelaku UMKM juga menjadi hambatan serius. Bank Indonesia melaporkan bahwa hanya 13% dari total 64,2 juta UMKM yang telah memanfaatkan ekosistem digital sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha (Bank Indonesia, 2020). Laporan OJK (2021) turut menegaskan bahwa meskipun UMKM memberikan kontribusi besar terhadap PDB, pemanfaatan kredit perbankan untuk sektor ini tetap rendah, yakni hanya sekitar 18% dari total penyaluran kredit. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa hambatan literasi digital dan akses modal masih menjadi isu struktural yang perlu diatasi.

Hambatan utama mencakup kurangnya pemahaman terkait bisnis digital serta keterbatasan infrastruktur pendukung (Tambunan, 2019). Digitalisasi usaha memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing produk komunitas perempuan. OECD (2019) menyatakan bahwa adopsi teknologi digital dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperbaiki sistem pencatatan keuangan. Selain itu, kesenjangan partisipasi tenaga kerja berdasarkan gender juga masih lebar. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya mencapai 54,52%, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 84,26% (BPS, 2021). Data ini menggambarkan terbatasnya akses perempuan terhadap peluang ekonomi yang lebih luas dan memperkuat urgensi perlunya intervensi pemberdayaan.

Pemberdayaan perempuan dalam ranah ekonomi mencakup dimensi akses, agensi, dan pencapaian, yang memungkinkan perempuan meningkatkan kapasitasnya sekaligus mengurangi ketimpangan gender (Yunus, 2024). Hal ini sangat relevan dengan peran kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang berfungsi sebagai wadah partisipasi perempuan dalam pembangunan berbasis komunitas (Kabeer, 2017). Transformasi kelompok PKK menjadi wirausaha berbasis digital merupakan solusi yang sangat relevan. Penguatan literasi keuangan, digitalisasi akses permodalan, serta pengembangan inovasi usaha diperkirakan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan mendukung pertumbuhan ekonomi komunitas yang berkelanjutan (Guntoro et al., 2024). Dengan pendekatan ini, PKK tidak hanya berperan sebagai penggerak kegiatan sosial, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

PKK Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, merupakan salah satu contoh komunitas perempuan yang memiliki potensi besar untuk melakukan transformasi digital. Kelompok ini beranggotakan 18 orang dengan struktur organisasi yang meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta empat kelompok kerja (Pokja I–IV) yang menjalankan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan survei internal, mayoritas anggota memiliki latar pendidikan dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi, menunjukkan kapasitas intelektual yang mendukung penerimaan inovasi literasi keuangan dan kewirausahaan.

Secara ekonomi, sekitar 65% keluarga anggota PKK bekerja di sektor informal dengan rata-rata pendapatan bulanan antara Rp2.500.000 hingga Rp4.000.000. Namun, 70% anggota belum memiliki akses ke layanan perbankan formal, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau fasilitas modal dari koperasi. Kondisi ini menegaskan adanya hambatan struktural dalam pengembangan usaha produktif. Di sisi lain, potensi kewirausahaan anggota PKK cukup besar. Survei awal menunjukkan bahwa 55% anggota memiliki keterampilan usaha seperti memasak, menjahit, dan membuat kerajinan tangan, tetapi keterampilan ini belum ditunjang oleh manajemen usaha yang sistematis ataupun strategi pemasaran digital (Surbakti et al., 2024).

PKK Kelurahan Karang Anyar memiliki potensi yang kuat untuk dikembangkan sebagai komunitas ekonomi berbasis pemberdayaan. Tingkat pendidikan anggota yang relatif tinggi memudahkan implementasi program literasi keuangan dan digitalisasi usaha. Namun, keterampilan usaha yang dimiliki oleh 55% anggota masih memerlukan dukungan manajemen usaha yang lebih terstruktur agar dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.



Gambar 1. Berbagai Keterampilan Anggota PKK di Kelurahan Karang Anyar

Walaupun memiliki potensi yang menjanjikan, PKK Kelurahan Karang Anyar masih dihadapkan pada sejumlah persoalan mendasar yang menghambat optimalisasi peran ekonominya. Tantangan utama terlihat pada rendahnya literasi keuangan, keterbatasan akses permodalan, serta lemahnya strategi pemasaran. Temuan survei awal menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil anggota sekitar 20% yang secara konsisten melakukan pencatatan arus kas usahanya. Selain itu, sekitar 65% anggota mengalami hambatan dalam memperoleh pinjaman modal karena minimnya hubungan dan informasi terkait lembaga keuangan formal. Dalam aspek pemasaran, sebagian besar produk yang dihasilkan masih dalam skala kecil dan belum didukung oleh strategi promosi yang sistematis. Meski 80% anggota memiliki akses internet, hanya 30% yang memanfaatkannya untuk aktivitas ekonomi atau pemasaran digital, sehingga daya saing produk menjadi terbatas.

Disamping itu, keterbatasan pengalaman pendidikan dan pelatihan formal turut memperlemah kapasitas anggota PKK dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Mayoritas anggota belum pernah mengikuti pelatihan literasi keuangan atau kewirausahaan secara terstruktur, sehingga kemampuan mereka dalam manajemen usaha, pemasaran digital, dan administrasi keuangan masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemberdayaan yang komprehensif melalui program pelatihan terarah, pendampingan berkelanjutan, dan fasilitasi akses terhadap layanan keuangan formal. Intervensi yang terintegrasi ini diharapkan dapat mendorong transformasi PKK Kelurahan Karang Anyar menjadi komunitas ekonomi yang mandiri serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam program ini dirancang menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif masyarakat pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Menurut Kemmis dan McTaggart (2005), PAR memungkinkan terjadinya proses kolaboratif antara peneliti dan masyarakat sehingga solusi yang dihasilkan menjadi lebih kontekstual, aplikatif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini sangat relevan bagi kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang menjadi mitra utama dalam program transformasi digital dan pemberdayaan ekonomi perempuan ini.

Pelaksanaan program pemberdayaan diawali dengan proses identifikasi mendalam terhadap kondisi mitra melalui survei, wawancara, dan *Focus Group Discussions* (FGD). Tahap ini menghasilkan pemetaan yang jelas mengenai tiga persoalan utama yang dihadapi anggota PKK, yaitu rendahnya literasi keuangan, keterbatasan akses terhadap modal usaha, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi mereka. Lusardi dan Mitchell (2014) menegaskan bahwa rendahnya literasi keuangan berdampak pada terbatasnya akses terhadap layanan keuangan formal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, program dirancang dalam tiga tahap utama:

- a. **Pelatihan Literasi Keuangan dan Digitalisasi Usaha (Tahap Pelatihan)**
Setelah kebutuhan mitra dipetakan, tahap pertama dalam kegiatan PKM ini berfokus pada pemberian pelatihan intensif. Pelatihan ini dibagi menjadi dua bidang utama, yakni 1) Pelatihan literasi keuangan, meliputi penyusunan anggaran rumah tangga, pencatatan arus kas sederhana, pengelolaan modal usaha, serta pengenalan produk keuangan (tabungan, kredit mikro, dan layanan digital); dan 2) Pelatihan digitalisasi usaha, mencakup penggunaan aplikasi pencatatan keuangan, strategi promosi melalui media sosial, serta cara membuat dan mengelola akun di *marketplace*. Pelaksanaan pelatihan ini merujuk pada hasil studi Atkinson dan Messy (2012), yang menunjukkan bahwa intervensi literasi keuangan berbasis pelatihan mampu meningkatkan keterampilan pengelolaan ekonomi rumah tangga dan usaha mikro.
- b. **Pendampingan Akses Permodalan (Tahap Fasilitasi)**
Tahap selanjutnya berfokus pada penyediaan informasi dan pendampingan akses modal usaha. Dalam tahap ini, tim memperkenalkan anggota PKK kepada berbagai lembaga keuangan formal seperti perbankan, koperasi, serta platform *fintech lending* yang legal dan terdaftar di OJK. Peserta diberikan pemahaman mengenai prosedur pengajuan kredit, persyaratan administrasi, dan manajemen risiko pinjaman. Pendekatan ini sesuai dengan temuan Demirgüç-Kunt et al. (2018), yang menegaskan bahwa inklusi keuangan merupakan elemen penting dalam pengembangan usaha mikro dan peningkatan kesejahteraan Perempuan.
- c. **Penguatan Kelembagaan Komunitas (Tahap *Institutional Strengthening*)**
Tahap selanjutnya adalah memperkuat kelembagaan PKK melalui mekanisme pembentukan koperasi mini berbasis digital, yang berfungsi sebagai wadah simpan pinjam dan pengelolaan modal kolektif. Penguatan kelembagaan ini didasarkan pada teori modal sosial Coleman (1988), yang menjelaskan bahwa jaringan, kepercayaan, dan kerja sama kelompok berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pemberdayaan komunitas.

Selama kegiatan berlangsung, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui observasi lapangan, laporan perkembangan, serta penggunaan media komunikasi seperti grup *WhatsApp* untuk menjaga konsistensi pencatatan keuangan dan perkembangan usaha anggota. Proses evaluasi dirancang dengan membandingkan data dasar (*baseline*) dengan hasil pasca-intervensi secara kuantitatif maupun kualitatif. Pendekatan evaluasi ini mengikuti panduan Creswell (2014) yang menegaskan bahwa kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas suatu program. Dengan

demikian, metode yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek, melainkan juga pada pengembangan model pemberdayaan yang dapat direplikasi dan diadaptasi oleh kelompok masyarakat lain. Pendekatan terintegrasi ini diharapkan mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi PKK serta mendorong peningkatan kemandirian ekonomi perempuan secara berkelanjutan berbasis komunitas.

3. Hasil Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada pemberdayaan kelompok PKK melalui literasi keuangan dan transformasi digital menunjukkan berbagai capaian signifikan pada dua aspek utama, yaitu manajemen usaha dan aspek sosial kemasyarakatan. Analisis terhadap hasil kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan level keberdayaan yang ditandai dengan perubahan pola pikir, keterampilan teknis, serta kemampuan adaptasi anggota PKK dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola usaha rumah tangga mereka. Peningkatan ini tercermin dari meningkatnya pemahaman peserta dalam pencatatan keuangan, kemampuan menggunakan aplikasi digital untuk pemasaran, serta tumbuhnya kepercayaan diri dalam mengakses layanan keuangan formal dan platform perdagangan digital. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil memperkuat kapasitas perempuan PKK sebagai pelaku ekonomi berbasis komunitas yang lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan ekonomi digital.



Gambar 2. Pelatihan Literasi Keuangan dan Manajemen Transaksi Digital

Hasil pelatihan dan pendampingan menunjukkan bahwa mayoritas peserta telah memahami konsep dasar pengelolaan keuangan. Sebanyak 80% peserta mampu menjelaskan kembali prinsip-prinsip dasar pencatatan keuangan sederhana, dan 60% mulai menerapkan buku kas atau aplikasi keuangan digital untuk mencatat arus masuk dan keluar uang. Indikator lain yang menegaskan keberhasilan kegiatan ini adalah 50% peserta kini memiliki rekening tabungan atau dompet digital, serta 50% telah mulai menggunakan QRIS atau e-wallet dalam transaksi penjualan produk. Peningkatan ini menunjukkan adanya perubahan perilaku dari pola

konvensional menuju sistem keuangan modern. Bukti konkrit berupa dokumentasi buku kas, contoh sistem pencatatan sederhana, dan laporan perbandingan sebelum dan sesudah PKM menjadi penguat transformasi tersebut.

Tabel 1. Hasil Analisis Peningkatan Keberdayaan pada Aspek Manajemen

Indikator	Capaian
Pemahaman konsep dasar manajemen keuangan	80% peserta memahami konsep dasar keuangan
Penerapan pencatatan keuangan sederhana	60% peserta telah mulai mencatat arus kas
Kepemilikan rekening tabungan/dompot digital	50% peserta memiliki akun digital
Penggunaan QRIS/e-wallet dalam transaksi	50% peserta menggunakan QRIS/e-wallet

Pada aspek sosial kemasyarakatan, kegiatan sosialisasi dan pelatihan menghasilkan peningkatan signifikan terhadap literasi keuangan anggota PKK. Pengukuran melalui pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan skor pemahaman terkait keuangan rumah tangga dan usaha mikro. Sebelum pelatihan, sebagian besar anggota belum memahami pentingnya perencanaan keuangan keluarga, pengelolaan utang, maupun penggunaan layanan keuangan formal. Setelah intervensi, skor pengetahuan meningkat secara substansial, menandakan bahwa kegiatan ini tidak hanya memberikan peningkatan kapasitas tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kemandirian ekonomi perempuan melalui pengelolaan keuangan yang baik. Rekap hasil pre-test dan post-test menjadi bukti empiris peningkatan tersebut.

Tabel 2. Hasil Analisis Peningkatan Keberdayaan pada Aspek Sosial Kemasyarakatan

Indikator	Capaian
Literasi keuangan sebelum kegiatan (pre-test)	Skor rendah, pemahaman masih terbatas
Literasi keuangan setelah kegiatan (post-test)	Skor meningkat signifikan
Kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi perempuan	Sikap dan motivasi meningkat
Penguatan komunitas melalui pembentukan lembaga berbasis digital	Muncul inisiatif PKK Digital Hub/koperasi mini

Program ini juga menghasilkan luaran praktis berupa peningkatan keterampilan digital masyarakat sasaran. Sebelum kegiatan berlangsung, hanya 20% anggota PKK yang terbiasa menggunakan *smartphone* untuk aktivitas produktif. Setelah rangkaian pelatihan, angka tersebut meningkat drastis menjadi 82%, meliputi kemampuan membuat catatan transaksi harian berbasis aplikasi digital, mengelola akun media sosial usaha, serta melakukan transaksi nontunai melalui *e-wallet*. Salah satu contoh nyata adalah kelompok usaha keripik pisang PKK yang mengalami peningkatan pesanan sebesar 35% setelah memanfaatkan *Instagram* sebagai media promosi.

Selain itu, kegiatan PKM berhasil mendorong lahirnya empat produk usaha baru yang dikembangkan anggota PKK, yaitu (1) keripik pisang aneka rasa, (2) sale pisang khas Karang Anyar, (3) keripik singkong manis, dan (4) minuman herbal jahe merah bawang dayak. Produk-produk tersebut telah dipasarkan secara digital melalui *WhatsApp Business* dan *Instagram*, memungkinkan jangkauan pasar yang lebih luas dan terukur. Berdasarkan survei internal, rata-rata pendapatan usaha meningkat 20–25% setelah penerapan strategi pemasaran digital. Temuan ini mengonfirmasi bahwa penguasaan keterampilan digital tidak hanya meningkatkan daya saing produk lokal tetapi juga berperan penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi perempuan melalui wirausaha berbasis komunitas.



Gambar 3. Produk Unggulan Mitra PKK

Hasil implementasi ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis literasi keuangan dan transformasi digital mampu meningkatkan keberdayaan kelompok perempuan dalam pengelolaan usaha rumah tangga dan usaha berskala kecil. Sejalan dengan temuan Atkinson dan Messy (2012), peningkatan literasi keuangan berdampak pada kemampuan mengelola sumber daya keuangan keluarga secara lebih efektif. Selain itu, akses terhadap teknologi digital dalam transaksi keuangan turut mendukung inklusi keuangan, sebagaimana ditegaskan oleh Demirgüç-Kunt et al. (2018). Secara sosial, kegiatan ini memperkuat solidaritas komunitas PKK melalui pembelajaran kolektif dan penguatan kelembagaan, sesuai dengan teori modal sosial Coleman (1988).

5. Penutup

Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan dampak positif yang nyata, terutama dalam mengubah cara pandang dan kebiasaan anggota PKK dalam mengelola keuangan rumah tangga maupun usaha mikro, sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan

teknologi digital yang sebelumnya belum dikuasai. Para peserta kini lebih terampil dalam melakukan pencatatan keuangan, menggunakan berbagai platform digital untuk mempromosikan produk, serta memahami langkah-langkah dasar dalam mengakses layanan keuangan formal. Program ini juga memperkuat ikatan sosial kelompok melalui proses pembelajaran kolaboratif, sehingga solidaritas dan semangat untuk berkembang bersama semakin meningkat. Selain meningkatkan kapasitas individu dan kelompok, kegiatan ini turut memunculkan inisiatif usaha baru yang dipasarkan secara digital, menunjukkan bahwa intervensi yang diberikan mampu menstimulasi kreativitas sekaligus meningkatkan keberanian anggota untuk terjun ke dunia wirausaha.

Untuk penyempurnaan ke depan, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, diperlukan pelatihan lanjutan mengenai inovasi produk, *branding*, dan strategi pemasaran digital tingkat lanjut agar kapasitas usaha dapat terus berkembang. Kedua, pendampingan rutin tetap perlu diberikan untuk memastikan penerapan praktik keuangan dan pemasaran digital berjalan konsisten. Ketiga, perlu diperluas kerja sama dengan lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan pelaku bisnis lokal guna memperkuat akses permodalan serta membuka peluang pasar yang lebih besar. Dengan langkah-langkah tersebut, program pemberdayaan ini diharapkan semakin optimal dan memberikan dampak keberlanjutan bagi peningkatan kesejahteraan perempuan dan komunitas.

Ucapan Terima Kasih (Opsional)

Ucapan terima kasih memungkinkan Anda mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam segi pendanaan.

Daftar Pustaka

- Atkinson, A., & Messy, F. (2012). Measuring financial literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) pilot study. *OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions*, No. 15. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Gender Tematik: Profil Perempuan Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan Perekonomian Indonesia 2020*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and the fintech revolution*. World Bank.
- Surbakti, E. W., Hasibuan, S., & Arjuna, M. D. (2024). Pelatihan Edukasi Seputar Basic Wirausaha Perempuan untuk Peningkatan Kapasitas UMKM Aisyiyah Berbasis Komunitas. *Capacitarea: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 71-77. <https://doi.org/10.35814/capacitarea.2024.004.02.10>
- Kabeer, N. (2017). Economic pathways to women's empowerment and active citizenship: What does the evidence from Bangladesh tell us?. *The Journal of Development Studies*, 53(5), 649-663. <https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1205730>
- Kementerian Keuangan RI. (2021). *Perempuan dan UMKM sebagai Pilar Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory action research: Communicative action and the public sphere. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage handbook of qualitative research* (pp. 559–603). Sage.
- Guntoro, G., Wibisono, M. A. A., Rahmawati, A., Ali, H. A., & Saputra, S. T. (2024). Pemberdayaan Umkm Dan Peran Wanita Melalui Digitalisasi Pemasaran: Kegiatan Pengabdian

- Masyarakat Di Kecamatan Kebon Pedas, Sukabumi. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(3), 306-310. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i3.107>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- OECD. (2019). *OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2019*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/34907e9c-en>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Statistik Perbankan Indonesia 2021*. Jakarta: OJK.
- Hamzah, A., Febriansyah, Y., & Teguh, I. (2025). Penguatan literasi keuangan bagi ibu rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian keuangan berkelanjutan. *JAMARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandiri*, 2(1), 35-44. <https://doi.org/10.37577/jamari.v2i01.898>
- Nofriadi, N., Elfiswandi, E., Rafki, R., & Lusiana, L. (2024). Analisis Hambatan dan Peluang Akses Pembiayaan bagi UMKM Perempuan: Studi Kasus Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan*, 1(3), 1-10. <https://doi.org/10.47134/jampk.v1i3.203>
- Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia: Masalah dan kebijakan pemberdayaan*. Jakarta: LP3ES.
- Yunus, M. (2024). Eksplorasi Model Inovasi Sosial dalam Pemberdayaan Perempuan di Era Ekonomi Berkelanjutan. *Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 166-174. <https://doi.org/10.59613/tg4w3014>